

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, tujuan negara tercantum jelas pada pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Karenanya negara membuat sebuah sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara secara keseluruhan dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Agar tujuan tersebut terjamin maka negara membuat suatu pertahanan dan keamanan negara.

Sebuah negara harus memiliki sebuah Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional (Susentyo, 2008, hlm. 5). Di Indonesia sendiri menggunakan doktrin ketahanan nasional melalui metode ASTAGATRA yang terdiri dari delapan aspek yang terbagi atas Pancagatra (lima aspek sosial) yaitu: ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan dan Trigatra (tiga aspek alamiah) yaitu keistimewaan geografis Indonesia, sumber daya alam dan potensi serta kemampuan rakyat (Lemhannas, 1991, hlm. 76).

Pertahanan dan keamanan merupakan bagian dari Ketahanan Nasional selain itu juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Upaya yang dilakukan dalam bidang pertahanan ditujukan untuk segala ancaman yang datang dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri (Lemhannas, 1991, hlm. 167). Pertahanan dan keamanan sendiri digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan kepentingan negara yang dibuat dalam bentuk kebijakan yang dijalankan agar negara tetap

berada dalam kondisi yang stabil. Untuk dapat menyelenggarakan pertahanan dan keamanan nasional diperlukan suatu pimpinan dan pengendali tertinggi. Maka Presiden Republik Indonesia menjadi pemimpin tertinggi dan pengendali pertahanan dan keamanan nasional. Dalam penyelenggarannya Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional yang dibagi menjadi dua yaitu Departemen Pertahanan dan Keamanan yang menyelenggarakan sebagian tugas di pemerintahan dan pembangunan dibidang Hankam serta Panglima ABRI yang melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pembinaan ABRI.

Ketahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan tidak sepenuhnya dipegang oleh militer, Indonesia sendiri menggunakan doktrin Hankamnas (Pertahanan dan Keamanan Nasional) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pasal 30 UUD 1945 yang berbunyi "*tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara*".

M. Jusuf merupakan salah seorang tokoh militer yang namanya mulai dikenal saat peristiwa Supersemar dan terlibat dengan peristiwa karena menjadi salah satu dari tiga tokoh yang membawa surat perintah 11 Maret bersama dua orang tokoh militer yaitu Basuki Rahmat dan Amir Machmud. Nama M. Jusuf menjadi semakin dikenal karena dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Perindustrian dalam kabinetnya selama dua periode yaitu pada Kabinet Pembangunan I (1968- 1973) dan Kabinet Pembangunan II (1973- 1978).

Kondisi pertahanan dan keamanan selama M. Jusuf menjabat sebagai Menteri Perindustrian (1973-1978) tidak selamanya berlangsung kondusif. Menteri Pertahanan dan Keamanan (1973- 1978) dipegang oleh Maraden Pangabean yang nantinya digantikan oleh M. Jusuf (1978- 1983). Selama Maraden Pangabean menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan banyak gangguan- gangguan nasional yang cukup mengambil perhatian dikalangan pemerintahan. Seperti konflik bersenjata dan gangguan keamanan yaitu Aceh (Gerakan Aceh Merdeka), Irian Jaya (Organisasi Papua Merdeka), dan Timor Timur (Fretilin). Belum lagi terjadi peristiwa besar pada masa itu yaitu peristiwa Malari.

Selain itu permasalahan gangguan keamanan menimbulkan masalah baru dalam bidang keamanan dan pertahanan. Adanya keterikatan antara Portugal dan Timor Timur dalam kasus ini antara kolonial Portugal dengan daerah yang dijajahnya Timor Timur. Jauh sebelum ini tahun 1950-an Timor Timur (selanjutnya disebut Timtim) diberikan status provinsi oleh Pemerintahan Salazar. Akan tetapi tindakan tersebut hanya sebuah formalitas saja, karena Timtim masih jauh terbelakang dibandingkan Portugal (Panggabean, 2010, Hlm. 428). Tahun 1974 timbul rezim baru di Portugal melalui apa yang disebut “*Flower Revolution*” yang akan menangani politik dekolonisasi di Timor Portugis (Timor Timur).

M. Panggabean sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (1973- 1978) mengambil langkah serius dalam proses dekolonisasi tersebut karena Timor Timur merupakan masalah vital bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun masalah Timor Timur sudah selesai akan tetapi proses integrasi Timor Timur kedalam wilayah Republik Indonesia masih meninggalkan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejak integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia, dipermasalahkan, baik di Dewan Keamanan (1975-1976) maupun di Majelis Umum PBB, Indonesia selalu berusaha agar PBB dan masyarakat internasional mengakui legalitas integrasi Timor Timur kepada Indonesia melalui Deklarasi Balibo 30 November 1975 (Wiharyanto, 2011, Hlm. 196). Integrasi Timor Timur kedalam wilayah RI berlangsung pada tanggal 17 Juli 1976.

Presiden Soeharto pada tahun 1978 memilih M. Jusuf yang sebelumnya adalah Menteri Perindustrian sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan menggantikan M. Panggabean. Kondisi negara saat M.Jusuf ketika menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan tidak selalu dalam keadaan yang aman. Terdapat beberapa gangguan untuk mengganggu keberlangsungan pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 1978, para tokoh nasional yang pernah memegang jabatan penting di negara RI merasa prihatin melihat perjalanan sejarah konstitusi yang terjadi sewaktu rezim Orde Lama. Kemudian muncullah Orde Baru sebagai penggantinya. Akan tetapi Orde Baru tidak lagi konsisten terhadap ikrarnya yang

diucapkan saat meruntuhkan Orde Lama (Sumarsono, 1997. Hlm. 144). Hingga muncullah Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB) yang dirikan oleh A.H Nasution dan Moh. Hatta dan Forum Studi dan Komunikasi TNI (Fosko) yang didirikan oleh purnawirawan TNI AD didirikan dengan tujuan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintah.

Pada perkembangannya, kedua lembaga ini dibatasi geraknya karena terlalu mengkritik pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 5 Mei 1980, lima puluh tokoh masyarakat menandatangani Pernyataan Keprihatinan yang kemudian dikenal dengan sebutan Petisi 50. Pernyataan keprihatinan itu sesungguhnya merupakan reaksi atas pidato Presiden Soeharto yang pada RAPIM ABRI dan pada peringatan hari jadi Kopassus.

Belum lagi masalah Timor Timur yang kembali mencuat. M. Jusuf ditinggali beberapa pekerjaan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan sebelumnya, Maraden Panggabean. Masih beroperasinya kelompok- kelompok bersenjata di Aceh, Irian Jaya dan Timor Timur yang memerlukan perhatian dari Menteri Pertahanan dan Keamanan M. Jusuf. Akan tetapi fokus utama M. Jusuf lebih kepada Timor Timur dalam memulihkan keamanan di sana. Karena situasi yang tidak berjalan kondusif di Timor Timur sehingga M. Jusuf kembali menugaskan prajuritnya untuk menciptakan keamanan di Timor Timur dengan mengadakan sebuah operasi militer.

Selain itu Menteri Pertahanan dan Keamanan M. Jusuf dikenal sebagai pencetus program ABRI Masuk Desa. Program ini adalah kelanjutan dari program sebelumnya yaitu *Civic Mission*, akan tetapi program ini tidak dapat terlaksana karena TNI sibuk dengan PKI dan kegiatan politik praktis pada awal Orde Baru. Sebelumnya sudah ada program sejenis ABRI Masuk Desa dengan nama Operasi Bhakti ABRI hanya saja intensitas pelaksanaannya masih sedikit.

ABRI Masuk Desa (AMD) merupakan salah satu perwujudan Dwifungsi ABRI. Dalam hal ini desa dipilih oleh ABRI sebagai sasaran pembangunan karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di desa, sehingga desa merupakan basis pertahanan rakyat dan bela negara (Setiowati, 2015, Hlm. 102). Dalam hal ini, M. Jusuf yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan

Keamanan mengambil suatu kebijakan, selain untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dan menjaga stabilitas negara dari gangguan nasional karena desa dijadikan objek pertahanan rakyat.

Ketertarikan penulis pada tokoh ini setelah membaca rekomendasi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang tokoh Amir Machmud. Selain itu penulis mendapatkan informasi lain dari penelitian terdahulu bahwa terdapat tiga tokoh TNI yang terlibat dalam peristiwa Supersemar dan salah satunya adalah M. Jusuf. Selain itu penelitian ini merupakan penyempurnaan dari penelitian terdahulu yaitu tentang peran Muhammad Jusuf dalam perpolitikan Orde Baru 1966- 1993.

Penulis memilih tokoh M. Jusuf karena pada awalnya penulis sangat tertarik dengan program ABRI Masuk Desa dan mengetahui informasi bahwa yang mencetuskan adalah M. Jusuf. Selain itu dipilihnya Orde Baru karena M. Jusuf menjadi sosok yang dekat dengan Soeharto sejak peristiwa G30S/PKI. Selama orde baru pun karir beliau cukup mencolok menjabat dalam pemerintahan Soeharto selama 25 tahun dan menempati posisi yang cukup ideal. Mengenai batasan periode, penulis beranggapan tahun 1978 merupakan awal kiprah M. Jusuf dalam pemerintahan Soeharto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (1978- 1983). Dan dipilihnya tahun 1983 sebagai batasan tahun penelitian karena pada tahun ini M. Jusuf berhenti menjabat sebagai Menteri dalam Kabinet Pembangunan Soeharto dan melanjutkan kiprahnya menjadi ketua BPK (Badan Pengawas Keuangan). Oleh karena itu, penulis menuangkan pemikirannya dalam judul **“Kiprah M. Jusuf dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan Masa Orde Baru 1978 -1983”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, penulis membuat batasan masalah yaitu *“Bagaimana Kiprah M. Jusuf dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan Masa Orde Baru 1978- 1983”* ?

Untuk memfokuskan permasalahan yang dikaji lebih jelas dan terarah, maka penulis memaparkan dalam beberapa pokok permasalahan yang di rumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan M. Jusuf ?
2. Bagaimana kondisi sosial, politik, pertahanan dan keamanan menjelang tahun 1978 ?
3. Bagaimana kebijakan M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam menjaga stabilitas negara 1978- 1983 ?
4. Bagaimana dampak kebijakan M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan 1978- 1983 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi gambaran umum tentang latar belakang kehidupan M. Jusuf.
2. Untuk menganalisis kondisi sosial politik pertahanan dan keamanan menjelang tahun 1978 ?
3. Untuk menganalisis kebijakan M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam menjaga stabilitas negara 1978- 1983.
4. Untuk menganalisis dampak dari kebijakan M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan 1978- 1983.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan mengkaji atau meneliti mengenai kiprah M. Jusuf dalam bidang Pertahanan dan Keamanan masa Orde Baru 1978- 1983 merupakan penyempurnaan penelitian terdahulu yaitu tentang peranan Muhammad Jusuf dalam perpolitikan Orde Baru 1966- 1993.
2. Dengan mengkaji atau meneliti mengenai kiprah M. Jusuf dalam Pemerintahan Soeharto 1968- 1983 dapat menambah informasi tentang tokoh- tokoh pada masa Orde Baru.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah penelitian. Bab ini disertai mengenai ketertarikan penulis dalam memilih permasalahan yang

diangkat. Untuk lebih memfokuskan pembahasan, pada bab ini juga berisikan rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang pemaparan mengenai konsep dan sumber literatur yang relevan baik buku ataupun penelitian terdahulu bagi penelitian skripsi ini. Selain itu peneliti menggunakan sumber- sumber lain yang relevan dengan judul penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan mengenai langkah- langkah, metode, pendekatan dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan penulis untuk mendapatkan sumber yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Tahapan ini meliputi heuristik, yaitu proses pengumpulan data. Kritik, yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan dari sumber yang telah didapatkan, kritik dilakukan secara eksternal dan internal. Interpretasi, yaitu proses penafsiran fakta-fakta yang telah ditemukan. Sedangkan tahap terakhir dinamakan Historiografi, yaitu kegiatan penulisan dan proses penyusunan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga penulis menguraikan langkah- langkah yang ditempuh penulis selama melaksanakan proses penulisan skripsi ini.

Bab IV Pembahasan, bab ini dapat dikatakan isi utama dari penulisan skripsi ini karena didalamnya berisi pembahasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dari proses pengolahan serta analisis yang telah dilakukan terhadap fakta- fakta yang telah diperoleh.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan skripsi. Pada bab ini terdapat penafsiran penulis dari hasil analisis dan temuan yang didapatkan. Kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan pada bab- bab sebelumnya.